

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELESTARIAN KAWASAN -SEBUAH SKETSA PEMIKIRAN-

Oleh :

Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra
Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada

disampaikan dalam
Bimbingan Teknis Pengelolaan Situs Warisan Dunia
Borobudur, 3-7 September 2007

Di masa kini pengembangan komunitas (*community development*) atau pembangunan masyarakat lebih banyak diartikan sebagai upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, dan bukan lagi sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sebuah komunitas kehidupan seperti dulu. Konsep pemberdayaan di sini penting, dan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang berbagai macam persoalan, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan pelestarian warisan budaya dan pelestarian kawasan.

Upaya-upaya pelestarian warisan budaya kini dianggap tidak lagi dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan lingkungan alam tempat warisan budaya tersebut berada. Asumsinya di sini adalah bahwa keberadaan warisan-warisan budaya ini berhubungan erat dengan lingkungan-lingkungan ini baik di masa lampau maupun di masa kini. Walaupun lingkungan-lingkungan ini sudah tidak lagi sama keadaannya dengan lingkungan-lingkungan yang dulu, namun relasi warisan budaya tersebut dengan lingkungan-lingkungan itu tidak berhenti, dan karena itu juga terus-menerus mengalami perubahan. Relasi-relasi dengan berbagai lingkungan yang berbeda ini membawa akibat yang berbeda pula terhadap kelestarian warisan budaya itu sendiri.

Dengan cara pandang seperti itu maka setiap upaya pelestarian warisan budaya tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan memperhatikan warisan budaya itu saja, tetapi juga lingkungannya. Pelestarian budaya yang tidak memperhatikan lingkungan fisik, sosial, dan budaya tempat warisan budaya tersebut berada diyakini akan bisa menjadi sangat mahal, akan

mudah mengalami kegagalan, atau mungkin tidak akan bertahan lama. Upaya-upaya pelestarian warisan budaya yang lebih lestari (*sustainable*) adalah yang lebih memperhatikan lingkungan alam yang ada, sekaligus lebih melibatkan lingkungan sosial di situ, dan tidak berlawanan dengan lingkungan budayanya.

Di masa kini, cara pandang ini tampak mulai biasa, dan diterima oleh banyak pihak. Situasi semacam ini bisa merugikan karena bisa membuat kita tidak dapat berbuat kritis dan teliti terhadap upaya-upaya pelestarian yang dilakukan dengan menggunakan paradigma tersebut. Dalam makalah ini saya mencoba untuk mengungkapkan lebih banyak lagi pokok-pokok pikiran dalam paradigma tersebut serta beberapa implikasi praktisnya terhadap upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Hal ini perlu dilakukan karena tanpa pengetahuan yang mendalam tentang pokok-pokok pikiran konseptual dalam paradigma tersebut, kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilakukan akan sangat mudah bergeser dari jalur yang seharusnya diikuti.

Masalah **pertama** yang harus diatasi adalah konseptual, atau masalah-masalah teoritis, yang berkenaan dengan pendefinisian konsep-konsep yang digunakan dalam kegiatan pelestarian warisan budaya. Masalah **kedua** adalah pemahaman secara rinci berbagai implikasi pada tataran operasional dari konsep-konsep yang digunakan. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai dua masalah ini, pelestarian kebudayaan yang akan dilakukan tidak akan berjalan seperti yang diduga atau diharapkan.

Apa yang saya paparkan di sini pada dasarnya adalah sebuah pemikiran yang belum sepenuhnya matang, belum seluruhnya jadi.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran masih perlu disempurnakan lagi di sana-sini. Meskipun demikian, kerangka pemikiran ini juga sudah dapat digunakan sebagai dasar bagi kegiatan pelestarian warisan budaya. Lewat kegiatan pelestarian warisan budaya yang nyata inilah kerangka pemikiran ini akan dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi ketepatannya sebagai sebuah landasan pemikiran.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Kawasan

Dua konsep pokok di sini adalah konsep pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kawasan. Pemberdayaan masyarakat di sini didefinisikan sebagai berbagai upaya, berbagai usaha atau kegiatan yang ditujukan untuk membuat suatu masyarakat menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri, tidak terlalu tergantung pada atau ditentukan oleh pihak lain. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang tinggal di suatu daerah tertentu dan memiliki hubungan satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak.

Pelestarian kawasan adalah berbagai upaya, berbagai usaha atau kegiatan untuk mempertahankan keberadaan sebuah kawasan dan keadaannya seperti yang ada pada saat itu. Mempertahankan keberadaan berarti menjaga, melindungi agar kawasan (yang dilindungi, dijaga) tetap ada. Mempertahankan keadaan berarti menjaga, melindungi agar sifat, ciri, kualitas, bentuk dari kawasan (yang dilindungi, dijaga) relatif tetap, atau jika berubah maka perubahan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Berkenaan dengan pelestarian tersebut, kita perlu beranggapan

bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tetap. Segala sesuatu pasti berubah. Kalau kita mengatakan sesuatu sebagai 'tetap' atau tidak berubah, itu merupakan sesuatu yang bersifat relatif. Demikian halnya dengan kawasan atau warisan budaya. Suatu kawasan hanya dapat kita katakan 'relatif tetap', 'relatif tidak berubah'. Yang penting untuk disepakati kemudian adalah seberapa besar perubahan tersebut boleh terjadi sehingga kita dapat mengatakan bahwa sesuatu tersebut telah berubah atau masih tetap, sebab suatu kawasan bisa saja keberadaannya tidak berubah—artinya, kawasan tersebut masih kita temukan—, tetapi keadaannya mungkin sudah tidak seperti dulu lagi, sudah banyak mengalami perubahan. Sebagai contoh misalnya kawasan Tamansari. Kompleks ini masih tetap ada sekarang, namun keadaannya kini sudah lain sekali dengan keadaannya pada masa Sultan Hamengku Buwono VIII misalnya.

Berangkat dari anggapan ini bahwa sesuatu itu pasti dan akan mengalami perubahan, maka upaya melestarikan sesuatu tidak perlu kita artikan sebagai upaya menjaga sesuatu tersebut tidak berubah. Perubahan boleh saja terjadi, sejauh masih dalam batas-batas yang disepakati bersama dan pada bagian-bagian yang dapat diterima perubahannya.

Pemberdayaan: Membuat Berdaya, Membuat Mandiri

Berkenaan dengan pemberdayaan, dalam hal ini perlu dibedakan beberapa bentuk keberdayaan sebagai hasil dari pemberdayaan tersebut. Paling tidak keberdayaan atau kemampuan suatu masyarakat untuk bertahan bertahan secara mandiri bisa dibedakan menjadi keberdayaan (a) secara ekonomi, (b) secara politik, (c) secara sosial, dan (d) secara budaya. **Berdaya secara ekonomi** berarti memiliki kemampuan untuk tetap memenuhi berbagai kebutuhan hidup dalam situasi dan kondisi yang ada karena memiliki sumber daya yang mencukupi. Keberdayaan secara ekonomi biasanya juga akan membawa

kepada keberdayaan sosial, politis, dan budaya, tetapi tidak selalu. Tolok ukur keberdayaan di sini adalah kemandirian. Hal ini berarti bahwa kemandirian adalah sesuatu yang dianggap baik, karena hal itu berarti juga kemerdekaan, kebebasan, dalam menentukan apa yang ingin dicapai dan cara mencapainya.

Berdaya secara sosial berarti memiliki kemampuan untuk membangun relasi-relasi dengan golongan, kelompok atau masyarakat lain, dan mampu memanfaatkan relasi-relasi ini untuk mempertahankan atau meningkatkan kemandirian yang telah dimiliki dalam berbagai bidang. Berdaya secara sosial bisa membawa kepada keberdayaan secara politik, bisa juga tidak, karena adanya relasi-relasi dengan masyarakat atau kelompok lain bisa membawa akibat berkurangnya kemandirian yang telah dimiliki. Dalam hal ini jenis relasi yang dimiliki memang turut menentukan kemandirian yang ada. Relasi ketergantungan kepada kelompok atau masyarakat lain merupakan relasi yang tidak menimbulkan kemandirian. Relasi yang menunjukkan kemandirian adalah relasi yang setara, yang manakala relasi tersebut terputus tidak akan menimbulkan akibat yang serius.

Suatu masyarakat dikatakan **berdaya secara politis** bilamana memiliki institusi-institusi yang menjadi wadah untuk mencapai tujuan, mewujudkan keinginan, untuk melakukan 'negosiasi' dengan pihak-pihak lain, yang memungkinkan untuk mengambil keputusan-keputusan berkenaan dengan alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan bebas, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak lain. Kemandirian semacam ini tidak selalu dimiliki oleh suatu masyarakat, dan dalam situasi seperti sekarang ini, hampir tidak ada masyarakat yang mandiri sepenuhnya. Oleh karena itu pula, kemandirian di sini bersifat relatif. Suatu masyarakat memiliki kemandirian politis relatif lebih kecil atau lebih besar daripada masyarakat lain.

Keberdayaan politis bisa berarti keberdayaan budaya yang lebih besar,

bisa juga tidak. Berdaya secara budaya berarti memiliki kesadaran akan diri sendiri, akan kepentingan sendiri, akan posisi diri sendiri dalam konteks ekonomi, politik, sosio kultural yang ada, serta memiliki *cultural capital* yang disadari dapat dimanfaatkan dengan baik. Keberdayaan politis akan berarti keberdayaan budaya yang lebih besar bilamana keberdayaan politis tersebut membuat kesadaran-kesadaran tersebut makin kuat dan *cultural capital* yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan.

Dalam hal ini memang harus selalu diingat bahwa keberdayaan pada berbagai bidang kehidupan di atas tidak harus selalu berkorelasi positif satu dengan yang lain, walaupun idealnya memang demikian. Misalnya, idealnya keberdayaan ekonomi akan berkaitan erat dan saling menguatkan dengan keberdayaan sosial, politik, dan budaya. Akan tetapi situasi kehidupan nyata mungkin sama sekali tidak memungkinkan hal ideal tersebut mudah atau dapat dicapai. Suatu masyarakat mungkin saja secara ekonomi masih cukup berdaya, namun pada bidang sosial dan politik mungkin sudah tidak sangat berdaya. Demikian pula pada bidang budayanya.

Pelestarian Kawasan

Sebuah kawasan selain berisi flora, fauna, dan variasi topografis, biasanya juga memiliki warisan-warisan budaya. Jika di situ ada warisan budaya, biasanya di situ juga ada pendukung budaya, yaitu manusia dan kehidupannya. Dengan demikian, sebuah kawasan dalam konteks ini sebaiknya ditafsirkan sebagai sebuah wilayah geografis dengan **aspek alami** (*natural aspect*), **aspek warisan budaya** (*cultural heritage aspect*), dan **aspek kehidupan manusianya** (*socio-cultural aspect*). Pelestarian sebuah kawasan perlu dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek yang berbeda ini, karena masing-masing aspek menuntut strategi pelestarian yang berbeda-beda.

Pelestarian lingkungan alam.

Jika kita berbicara mengenai kawasan, gambaran yang umumnya muncul dalam benak kita adalah sebuah wilayah, daerah dengan kondisi-kondisi fisiknya, seperti flora, fauna, dan variasi topografinya. Kawasan dalam gambaran seperti ini merupakan aspek fisik dari sebuah kawasan; aspek lingkungan alam dari kawasan tersebut. Pelestarian kawasan dari perspektif ini dapat diartikan sebagai berbagai upaya, berbagai usaha atau kegiatan untuk mempertahankan keberadaan sebuah kawasan dan keadaannya seperti yang ada pada saat itu. Mempertahankan keadaan berarti menjaga, melindungi agar sifat, ciri, kualitas, bentuk dari flora, fauna, dan topografi kawasan (yang dilindungi, dijaga) relatif tetap, atau jika berubah maka perubahan telah disepakati bersama. Pelestarian kawasan seperti ini tidak berbeda dengan pelestarian lingkungan alam sebuah kawasan.

Pelestarian warisan budaya.

Pelestarian pada aspek ini merupakan berbagai upaya, berbagai usaha atau kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keadaan warisan – warisan budaya seperti yang ada pada saat itu atau mengubahnya mendekati keadaannya di masa lampau. Pelestarian yang seperti ini misalnya adalah kegiatan restorasi berbagai candi di Jawa Tengah, yang ketika ditemukan dalam keadaan rusak dan kacau. Restorasi di sini berarti mengubah kondisi candi yang sudah berantakan menjadi candi yang lebih mirip keadaannya di masa lampau, ketika masih digunakan.

Pelestarian kehidupan masyarakat.

Pelestarian pada aspek ini merupakan berbagai upaya, berbagai usaha, atau kegiatan untuk mempertahankan keberadaan sebuah pola kehidupan masyarakat dan keadaannya seperti yang ada pada saat itu. Mempertahankan keberadaan berarti menjaga, melindungi agar sifat, ciri, kualitas, dan pola dari kehidupan masyarakat (yang dilindungi, dijaga)

relatif tetap, atau jika berubah maka perubahan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Perubahan ini mungkin dilakukan sebagai wujud peningkatan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pelestarian ketiga aspek tersebut sebaiknya dipandang sebagai upaya-upaya yang saling berkaitan satu sama lain, karena dalam kenyataan hidup sehari-hari ketiganya memang selalu berkaitan. Misalnya saja, kelestarian sebuah warisan budaya berupa sebuah gua tempat kehidupan manusia purbakala, yang ternyata merupakan sebuah gua yang dihuni oleh ribuan kelelawar, dan terdiri dari batuan kapur yang sangat cocok untuk bahan bangunan, akan sangat berkaitan dengan pola mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar gua ataupun tinggal jauh dari gua tetapi memiliki modal yang kuat untuk mengolah sumber daya alam di gua tersebut.

Keberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Kawasan: Saling Pengaruh

Keberdayaan suatu masyarakat erat kaitannya dengan kelestarian dari sebuah kawasan. Keberdayaan suatu masyarakat dalam berbagai bidang, yang disertai dengan kesadaran tinggi mengenai pentingnya pelestarian kawasan akan memberikan akibat yang sangat positif terhadap kegiatan pelestarian sebuah kawasan. Kita dapat membayangkan situasi idealnya seperti demikian.

Masyarakat di kawasan X memiliki sejumlah warisan budaya yang mereka anggap sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup mereka sebagai sebuah masyarakat dengan corak budaya tertentu. Dengan berbagai macam kegiatan mereka berupaya membuat warisan-warisan budaya tersebut terjaga keberadaannya dan keadaannya, dan ini mereka lakukan dengan baik karena mereka mampu mandiri secara ekonomi. Mereka dapat mempertahankan pola kehidupan yang telah diwariskan oleh

nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Kemandirian ekonomi ini membuat mereka mandiri secara politik, sosial, dan budaya. Mereka memiliki perangkat institusional untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial mereka, yang membuat mereka tidak dapat ditekan dan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain ketika mereka mengambil keputusan-keputusan penting berkenaan dengan kehidupan mereka mengambil keputusan-keputusan penting berkenaan dengan kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, mereka mampu melestarikan lingkungan alam di sekitar tempat tinggal mereka beserta dengan segala warisan budaya yang ada di dalamnya. Di lain pihak, dilihat dari sudut pandang yang lain, situasi dan kondisi dalam masyarakat X tersebut juga telah memungkinkan mereka melestarikan kawasan tempat tinggal mereka. Keberdayaan budaya mereka membuat tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang dapat mereka pertahankan, dan ini telah membuat mereka mampu mandiri secara ekonomi. Mereka tidak terpengaruh oleh pola kehidupan yang ada pada masyarakat lain, yang ada di sekitar mereka yang telah mengalami perubahan.

Contoh fiktif ini sangat mungkin kita temui dalam kehidupan nyata. Kasus yang mendekati contoh tersebut adalah kasus masyarakat Baduy, yang sampai saat ini masih tetap berhasil melestarikan warisan budaya, lingkungan alam mereka, serta pola kehidupan mereka sehari-hari. Ini terlihat terutama di kalangan orang Baduy dalam. Kasus yang lain adalah masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan. Contoh di atas menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas antara pelestarian kawasan dengan keberdayaan suatu masyarakat. Meskipun demikian wujud keterkaitan tersebut tidak selalu jelas dan mudah diketahui. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melestarikan sebuah kawasan sebaiknya dimulai dengan

sebuah penelitian yang ditujukan untuk mengetahui dan memahami dengan baik hubungan timbal balik antara kehidupan masyarakat di sebuah kawasan dengan lingkungan fisik kawasan dengan berbagai warisan budaya yang terdapat di dalamnya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan timbal balik ini akan sangat membantu kita dalam menentukan langkah-langkah pelestarian warisan budaya yang akan kita jalankan.

Perbenturan Kepentingan

Faktor sosial lain yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan pelestarian kawasan selain faktor pemberdayaan adalah adanya perbenturan kepentingan di kalangan warga masyarakat. Masalah ini lebih sulit penyelesaiannya daripada persoalan pemberdayaan masyarakat, karena selama pemberdayaan masyarakat masih berjalan lancar tanpa disertai dengan berbagai perbenturan kepentingan maka proses pemberdayaan akan berjalan dengan lancar dan selanjutnya proses pelestarian kawasan juga akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika berbagai kepentingan dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan perbenturannya maka proses pemberdayaan dengan sendirinya akan terhambat, demikian pula dengan upaya-upaya pelestarian kawasannya.

Berkenaan dengan kepentingan-kepentingan ini, paling tidak ada dua macam perbenturan kepentingan yang dapat ditengarai. Yang pertama adalah perbenturan antara kepentingan dan keinginan untuk mengalami modernisasi, yang berarti keinginan akan adanya perubahan-perubahan. Yang kedua adalah perbenturan antara keinginan untuk memanfaatkan apa yang ada, yang mungkin akan menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan, dengan keinginan untuk melestarikan, yang kadang-kadang berarti mengurangi upaya-upaya pemanfaatan akan dapat menyebabkan kerusakan.

Sebagai contoh perbenturan kepentingan yang pertama adalah yang

terjadi di desa Krebet, Bantul. Di desa ini telah berkembang kerajinan batik kayu. Berbagai cinderamata berupa topeng kayu dan wayang kayu yang dibatik merupakan kerajinan khas dari daerah ini. Ketika produk cinderamata ini semakin dikenal oleh para wisatawan dalam dan luar negeri, tidak sedikit orang yang datang ke daerah ini untuk membeli langsung cinderamata tersebut langsung dari para produsennya. Kemakmuran sebagian penduduk desa, terutama produsen cinderamata, segera meningkat dengan cepat. Rumah-rumah *gedhong* mulai tampak berdiri, menggantikan rumah tradisional Jawa yang terbuat dari bambu dan kayu. Kekhawatiran mulai meningkat berkenaan dengan kelestarian situasi dan kondisi desa. Meningkatnya kemakmuran memang telah mendorong warga yang mampu membangun rumah baru, karena mereka juga ingin menggapai modernisasi. Rumah *gedhong* adalah simbol modernisasi dan juga prestise. Rumah *gedhong* adalah simbol keberhasilan dalam usaha. Di lain pihak, mereka yang berasal dari luar Krebet mulai khawatir bahwa desa ini akan segera kehilangan ciri khasnya, dan itu berarti hilangnya salah satu daya tarik desa tersebut bagi orang luar. Demikian juga kekhawatiran dari pihak pemerintah daerah, terutama di tingkat kecamatan, karena desa Krebet telah mampu menarik sejumlah wisatawan datang ke kecamatan tersebut. Perbenturan kepentingan masyarakat setempat untuk menggapai simbol modernisasi mulai terasa berbenturan dengan kepentingan pihak luar yang ingin melihat masyarakat Krebet maju dan mandiri dalam ekonomi tanpa harus kehilangan wajah lamanya. Untung perbenturan kepentingan ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga proses pelestarian kawasan dapat tetap berjalan seiring dengan ekonomi masyarakat yang semakin membaik.

Perbenturan kedua terlihat pada kasus masyarakat kampung Naga, yang memberi tanggapan negatif terhadap kegiatan pariwisata budaya yang semakin meningkat di kawasan mereka.

Sebetulnya persoalan yang lebih mendasar tampaknya adalah persoalan "harga diri", akan tetapi persoalan kelestarian budaya tampaknya juga telah menjadi salah satu pendorong munculnya reaksi negatif tersebut. Masyarakat kampung Naga tampaknya telah merasa semakin "risi" dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke kampung mereka, mengambil foto kehidupan mereka, dan memandang mereka bagaikan "tontonan". Mereka merasa kehidupan sehari-hari mereka mulai terganggu oleh kedatangan wisatawan yang menunjukkan sikap dan pola perilaku tertentu yang tidak mereka sukai. Padahal arus wisatawan ke kampung ini diinginkan untuk semakin meningkat, karena dengan begitu "aset Budaya" pemerintah daerah ini berarti akan semakin banyak mendatangkan manfaat. Untuk menghindarkan akibat yang semakin buruk masyarakat kampung Naga kemudian memilih untuk menutup diri mereka dan meminta wisatawan tidak didatangkan lagi ke kampung Naga. Dengan begitu kehidupan mereka akan menjadi lebih tenang, dan budaya mereka diharapkan akan dapat bertahan lebih lama, lebih lestari.

Perbenturan Kepentingan

Faktor sosial lain yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan pelestarian kawasan selain faktor pemberdayaan adalah adanya perbenturan kepentingan di kalangan warga masyarakat. Masalah ini lebih sulit penyelesaiannya daripada persoalan pemberdayaan masyarakat, karena selama pemberdayaan masyarakat masih berjalan lancar tanpa disertai dengan berbagai perbenturan kepentingan maka proses pemberdayaan akan berjalan dengan lancar dan selanjutnya proses pelestarian kawasan juga akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika berbagai kepentingan dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan perbenturannya maka proses pemberdayaan dengan sendirinya akan terhambat, demikian pula dengan upaya-upaya pelestarian kawasannya.

Berkenaan dengan kepentingan-kepentingan ini, paling tidak ada dua macam perbenturan kepentingan yang dapat ditengarai. Yang pertama adalah perbenturan antara kepentingan dan keinginan untuk mengalami modernisasi, yang berarti keinginan akan adanya perubahan-perubahan. Yang kedua adalah perbenturan antara keinginan untuk memanfaatkan apa yang ada, yang mungkin akan menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan, dengan keinginan untuk melestarikan, yang kadang-kadang berarti mengurangi upaya-upaya pemanfaatan akan dapat menyebabkan kerusakan.

Sebagai contoh perbenturan kepentingan yang pertama adalah yang terjadi di desa Krebet, Bantul. Di desa ini telah berkembang kerajinan batik kayu. Berbagai cinderamata berupa topeng kayu dan wayang kayu yang dibatik merupakan kerajinan khas dari daerah ini. Ketika produk cinderamata ini semakin dikenal oleh para wisatawan dalam dan luar negeri, tidak sedikit orang yang datang ke daerah ini untuk membeli langsung cinderamata tersebut langsung dari para produsennya. Kemakmuran sebagian penduduk desa, terutama produsen cinderamata, segera meningkat dengan cepat. Rumah-rumah *gedhong* mulai tampak berdiri, menggantikan rumah tradisional Jawa yang terbuat dari bambu dan kayu. Kekhawatiran mulai meningkat berkenaan dengan kelestarian situasi dan kondisi desa. Meningkatnya kemakmuran memang telah mendorong warga yang mampu membangun rumah baru, karena mereka juga ingin menggapai modernisasi. Rumah *gedhong* adalah simbol modernisasi dan juga prestise.

Rumah *gedhong* adalah simbol keberhasilan dalam usaha. Di lain pihak, mereka yang berasal dari luar Krebet mulai khawatir bahwa desa ini akan segera kehilangan ciri khasnya, dan itu berarti hilangnya salah satu daya tarik desa tersebut bagi orang luar.

Demikian juga kekhawatiran dari pihak pemerintah daerah, terutama di tingkat kecamatan, karena desa Krebet telah mampu menarik sejumlah

wisatawan datang ke kecamatan tersebut. Perbenturan kepentingan masyarakat setempat untuk menggapai simbol modernisasi mulai terasa berbenturan dengan kepentingan pihak luar yang ingin melihat masyarakat Krebet maju dan mandiri dalam ekonomi tanpa harus kehilangan wajah lamanya. Untung perbenturan kepentingan ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga proses pelestarian kawasan dapat tetap berjalan seiring dengan ekonomi masyarakat yang semakin membaik.

Perbenturan kedua terlihat pada kasus masyarakat kampung Naga, yang memberi tanggapan negatif terhadap kegiatan pariwisata budaya yang semakin meningkat di kawasan mereka. Sebetulnya persoalan yang lebih mendasar tampaknya adalah persoalan "harga diri", akan tetapi persoalan kelestarian budaya tampaknya juga telah menjadi salah satu pendorong munculnya reaksi negatif tersebut. Masyarakat kampung Naga tampaknya telah merasa semakin "risi" dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke kampung mereka, mengambil foto kehidupan mereka, dan memandang mereka bagaikan "tontonan". Mereka merasa kehidupan sehari-hari mereka mulai terganggu oleh kedatangan wisatawan yang menunjukkan sikap dan pola perilaku tertentu yang tidak mereka sukai. Padahal arus wisatawan ke kampung ini diinginkan untuk semakin meningkat, karena dengan begitu "aset budaya" pemerintah daerah ini berarti akan semakin banyak mendatangkan manfaat. Untuk menghindarkan akibat yang semakin buruk masyarakat kampung Naga kemudian memilih untuk menutup diri mereka dan meminta wisatawan tidak didatangkan lagi ke kampung Naga. Dengan begitu kehidupan mereka akan menjadi lebih tenang, dan budaya mereka diharapkan akan dapat bertahan lebih lama, lebih lestari.

Strategi Pelestarian dan Strategi Pemberdayaan

Dalam menentukan strategi pelestarian dan pemberdayaan kita

dapat berangkat dari beberapa asumsi berikut. Pertama, bahwa semakin tinggi tingkat keberdayaan ekonomi suatu masyarakat semakin mudah masyarakat tersebut untuk diajak melakukan kegiatan pelestarian budaya mereka. Kedua, bahwa semakin tinggi tingkat keberdayaan politik suatu masyarakat semakin mudah masyarakat tersebut diajak untuk melakukan kegiatan pelestarian warisan budaya mereka. Ketiga, bahwa semakin tinggi tingkat keberdayaan sosial suatu masyarakat semakin mudah masyarakat tersebut diajak untuk melakukan kegiatan pelestarian warisan budaya mereka. Keempat, bahwa semakin tinggi tingkat keberdayaan budaya suatu masyarakat semakin mudah masyarakat tersebut diajak untuk melakukan kegiatan pelestarian warisan budaya mereka.

Dalam hal ini dianut asumsi bahwa ada hubungan yang erat antara kegiatan pelestarian sebuah kawasan dengan tingkat keberdayaan suatu masyarakat.

Langkah pertama yang perlu ditempuh di sini adalah (a) penelitian mengenai situasi dan kondisi sosial-budaya kawasan yang akan dilestarikan, dengan berbagai macam permasalahannya, dan atas dasar hasil penelitian ini (b) menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Untuk keberdayaan masyarakat, hal itu dapat diketahui melalui beberapa indikator, sebagaimana telah didefinisikan di atas.

Misalnya saja, untuk menentukan tingkat kemandirian suatu masyarakat secara ekonomi perlu diperhatikan di sini kemampuan masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta berbagai sumber daya yang dapat mereka capai dan manfaatkan. Tingkat kemandirian secara politis dapat ditentukan melalui adatidaknya institusi-institusi yang menjadi wadah atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif masyarakat tertentu. Keberdayaan pada aspek-aspek yang lain dapat ditentukan dengan menggunakan indikator yang telah disepakati secara bersama.

Setelah tingkat kemandirian ini dapat ditentukan, selanjutnya perlu diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan dalam mencapai kemandirian. Dengan kata lain, di sini kita mulai menentukan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ketika mereka berupaya untuk menjadi mandiri. Dalam hal ini kita perlu menentukan (a) aspek permasalahan, (b) tingkat permasalahan, (c) bidang permasalahan dan (d) tempat (*locus*) permasalahan. Berkenaan dengan aspeknya, apakah masalah yang dihadapi merupakan masalah politik (yakni masalah persaingan antar kelompok dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada), masalah alokasi sumberdaya (yakni pembagian dan pendistribusian pemanfaatan sumber daya), masalah sumber daya manusia yang mengelolanya (misalnya masalah tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, semangat kerja, ketrampilan, dsb) atau masalah lain. Sehubungan dengan tingkatnya, apakah masalah yang dihadapi berada pada tataran nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan, atau kelurahan. Berkaitan dengan bidangnya, apakah masalah tersebut berada pada bidang infrastruktur, bidang hukum, bidang kerjasama, atau pada bidang yang lain. Berkenaan dengan locusnya, apakah masalah tersebut berada di kalangan aparat pemerintahan, di kalangan warga penduduk desa, di kalangan LSM, atau di kalangan lain.

Namun, selain itu keberdayaan, suatu masyarakat pada dasarnya juga memiliki potensi-potensi dalam dirinya, yang jika dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik akan dapat menaikkan tingkat kemandirian masyarakat tersebut. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan memahami potensi-potensi yang dimiliki suatu masyarakat; menemukan *social* dan *cultural capital* yang dimiliki masyarakat tersebut, termasuk dalam hal ini mengetahui berbagai kendala yang membuat potensi-potensi yang ada tidak dapat

tumbuh dan berkembang dengan baik, atau yang membuat kapital sosial dan budayanya tidak dapat secara optimal dimanfaatkan untuk mencapai kemandirian dalam berbagai aspek dan bidang.

Tahap berikutnya adalah menentukan strategi penyelesaian masalah secara bertahap berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Misalnya saja, kalau masalahnya berada pada tataran nasional, maka penyelesaiannya tidak lagi dapat dilakukan di tingkat lokal. Mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu melibatkan berbagai departemen pemerintah, atau masalahnya terletak pada bidang kebijakan, maka masalah tersebut tentunya hanya akan dapat diselesaikan oleh para pejabat yang ada di tingkat tersebut, dan untuk itu perlu ada koordinasi yang bagus dan kuat serta koordinasi yang mumpuni. Kalau masalahnya berada di tingkat kabupaten, dan locusnya ada di kalangan pemerintah, bidangnya perencanaan, maka strategi penyelesaian maka strategi penyelesaian harus ditujukan ke tingkat dan *locus* ini. Misalnya, dengan menghubungi pihak pemerintah untuk meninjau kembali atau memperbaiki perencanaan yang ada, atau memperbaiki pelaksanaan rencana tersebut, atau meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam membuat perencanaan daerah, dan sebagainya.

Pelestarian Kawasan Oleh Masyarakat: Beberapa Siasat

Meskipun untuk menyusun rencana dan strategi pelestarian kawasan beberapa penelitian masih perlu dilakukan, tetapi dari berbagai penelitian dan kegiatan pelestarian yang sudah ada dapat ditentukan juga beberapa rencana dasar atau minimal untuk pelestarian kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini fokus perencanaan dan strategi adalah pemberdayaan masyarakat. Asumsi yang dianut adalah bahwa pelestarian kawasan akan dapat lebih terjaga dan bertahan lama bilamana ada partisipasi masyarakat di kawasan

tersebut dalam kegiatan pelestarian tersebut. Partisipasi masyarakat ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan bilamana unsur-unsur pendukung minimalnya telah ada, dan unsur-unsur tambahan lainnya juga ada dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Unsur-unsur pendukung yang minimal, yang harus ada, untuk terjadinya pelestarian kawasan yang berbasis masyarakat lain adalah: (a) adanya kesadaran kolektif tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan; (b) adanya perangkat kelembagaan untuk mewujudkan kesadaran kolektif tersebut menjadi sebuah tindakan kolektif, tindakan bersama (*collective action*); (c) adanya fasilitas untuk mendukung kegiatan pelestarian yang partisipatif tersebut.

Untuk membangun kesadaran kolektif tentang perlunya pelestarian kawasan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antaralain adalah: ceramah-ceramah tentang manfaat pelestarian sebuah kawasan, pelatihan, diskusi, pemutaran film, pameran-pameran, pelibatan warga masyarakat dalam kegiatan pelestarian, dan sebagainya. Warga masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan semacam ini sebaiknya berasal dari berbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat, dan dilaksanakan secara teratur dengan tujuan yang jelas, disertai dengan evaluasi tentang keberhasilannya atau dampak positifnya. Selain itu, warga masyarakat tersebut tidak hanya mereka yang tinggal secara tetap di kawasan tersebut, tetapi juga mereka yang datang secara musiman, atau datang hanya untuk mencari nafkah di kawasan tersebut, sebab tidak jarang mereka yang berasal dari luar inilah yang sangat banyak memanfaatkan sumber daya alam dan budaya di sebuah kawasan.

Membangun institusi juga perlu dilakukan secara partisipatif. Institusi ini antara lain adalah organisasi-organisasi, persatuan-persatuan, paguyuban-paguyuban, kelompok-

kelompok, dan sebagainya, yang fungsinya antara lain adalah mengartikulasikan kepentingan-kepentingan, nilai-nilai, pandangan-pandangan masyarakat mengenai pelestarian kawasan. Institusi-institusi tersebut sebaiknya dibangun atas dasar kesadaran, kemauan atau keinginan masyarakat sendiri. Pihak luar disini hanya bertindak sebagai fasilitator atau pendorong bagi pembentukan dan pematapan institusi tersebut. Warga masyarakat pendatang juga perlu dilibatkan di sini, agar mereka dapat menjadi lebih mudah diatur, dan proses pembentukannya harus didasarkan pada spirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan adanya organisasi-organisasi yang dibentuk atas dasar kemauan masyarakat, tindakan kolektif akan lebih mudah dibangun, dan hal semacam ini sangat diperlukan dalam upaya-upaya pelestarian sebuah kawasan.

Unsur pendukung berikutnya adalah fasilitas-fasilitas untuk mewujudkan tindakan kolektif pelestarian kawasan. Tanpa fasilitas, kegiatan kolektif akan menjadi lebih sulit diwujudkan atau diciptakan. Untuk membuat rencana kegiatan paling tidak diperlukan sebuah ruang untuk melakukan rapat-rapat. Di ruang ini tersedia sejumlah fasilitas pokok upenghapus, meja, dan kursi untuk peserta rapat, dan sebagainya. Dengan adanya fasilitas fisik ini kegiatan pelestarian akan dapat dibuat lebih terencana, lebih jelas dan sistematis.

Penutup

Dalam makalah ini saya mencoba memaparkan sketsa pemikiran saya tentang pelestarian kawasan dan hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemikiran yang dikemukakan di sini mencakup juga beberapa asumsi dasar dari pelestarian dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Saya berasumsi bahwa kegiatan pelestarian sebuah kawasan akan lebih lestari (*sustainable*) dan lebih menghemat biaya bilamana dilakukan dengan melibatkan warga masyarakat

di kawasan itu sendiri. Agar strategi pelibatan ini dapat dilakukan secara optimal maka proses-proses pelibatan warga masyarakat dalam kegiatan pelestarian serta pemahaman mengenai situasi dan kondisi masyarakat yang akan dilibatkan menjadi penting. Penggunaan paradigma semacam ini dalam pelestarian kawasan membawa kita pada dua persoalan, yakni persoalan konseptual, atau masalah-masalah teoritis, yang berkenaan dengan pendefinisian konsep-konsep yang digunakan dalam kegiatan pelestarian warisan budaya, dan masalah pemahaman secara rinci berbagai implikasi pada tataran operasional dari konsep-konsep yang digunakan.

Pandangan-pandangan saya mengenai beberapa konsep penting yang digunakan dalam kerangka paradigma di atas. Dua konsep penting di sini adalah pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kawasan. Pemberdayaan masyarakat di sini didefinisikan sebagai berbagai upaya, berbagai usaha atau kegiatan untuk membuat suatu masyarakat menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri, tidak terlalu tergantung pada atau ditentukan oleh pihak lain. Kemandirian ini paling tidak dalam bidang: ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Pelestarian kawasan di sini didefinisikan sebagai berbagai upaya, berbagai usaha atau kegiatan untuk mempertahankan keberadaan sebuah kawasan dan keadaannya seperti yang ada pada waktu tertentu. Mempertahankan keberadaan di sini berarti menjaga, melindungi agar kawasan (yang dilindungi, dijaga) tetap ada, sedang mempertahankan keadaan berarti menjaga, melindungi agar sifat, ciri, kualitas, bentuk, dari kawasan (yang dilindungi, dijaga) dapat relatif tetap, atau jika berubah maka perubahan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Kawasan dalam konteks ini ditafsirkan sebagai sebuah wilayah geografis dengan aspek alami (*natural aspect*), aspek warisan budaya

(*cultural heritage aspect*) dan aspek kehidupan manusianya (*socio-cultural aspect*). Pelestarian sebuah kawasan perlu dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek yang berbeda ini, karena masing-masing menuntut strategi pelestarian yang berbeda-beda.

Kelestarian dari sebuah kawasan erat kaitannya dengan keberdayaan masyarakatnya dalam berbagai bidang. Proses pelestarian kawasan tentu akan menghadapi berbagai persoalan, dan salah satu persoalan sosial budaya yang penting adalah adanya adanya berbagai kepentingan yang berbeda, yang akan saling berbenturan. Dua macam berbenturan kepentingan dapat ditengarai, yakni: berbenturan antara kepentingan dan keinginan untuk mengalami modernisasi dengan keinginan untuk melestarikan; kedua, berbenturan antara keinginan untuk memanfaatkan apa yang ada, yang mungkin akan menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan, dengan keinginan untuk melestarikan, yang kadang-kadang berarti mengurangi upaya-upaya pemanfaatan karena kegiatan pemanfaatan akan menimbulkan akibat yang merugikan.

Untuk dapat mengetahui dengan baik situasi dan kondisi masyarakat, serta lingkungannya perlu dilakukan penelitian-penelitian. Dari hasil penelitian inilah akan dapat disusun rencana pelestarian kawasan yang lebih baik, dengan landasan yang kokoh. Pelestarian kawasan yang berbasis masyarakat menuntut adanya sejumlah unsur pendukung penting, yakni: (a) adanya kesadaran kolektif tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan; (b) adanya perangkat kelembagaan untuk mewujudkan kesadaran kolektif tersebut menjadi tindakan kolektif, tindakan bersama (*collective action*); (c) adanya fasilitas untuk mendukung kegiatan pelestarian yang partisipatif tersebut. Unsur-unsur pendukung inilah yang harus diadakan terlebih dulu sebelum unsur-unsur lain diperhatikan. ■